Sasambo:
Jurnal Abdimas (*Journal of Community Service*)
http://journal-center.litpam.com/index.php/Sasambo_Abdimas

November 2026 Vol. 8, No. 4
e-ISSN: 2686-519X
pp. 420-436

Penguatan Layanan Bimbingan dan Konseling melalui Pendampingan Administratif bagi Guru Non-BK di SMP Satu Atap 1 Jatinagara

Sazkia Nuril Pathmi, Opik Jamaludin
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa. Jalan Raya Panjalu Selatan 46264 Panjalu . Indonesia
Corresponding Author e-mail: sazkianurilfatmi@gmail.com

Diterima: Agustus 2026 | Direvisi: Agustus 2026 | Disetujui: Agustus 2026 | Diterbitkan: November 2026

Abstrak

Keterbatasan kompetensi guru yang menjalankan fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) tanpa latar belakang pendidikan BK dapat memengaruhi kualitas perencanaan, administrasi, dan pelaksanaan layanan di sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat layanan BK melalui pendampingan administratif bagi guru non-BK di SMP Satu Atap 1 Jatinagara. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang melibatkan guru yang menjalankan fungsi BK, kepala sekolah, dan peserta didik. Kegiatan dilaksanakan melalui enam tahap, yaitu identifikasi kondisi awal, pemetaan kebutuhan, perencanaan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, penyusunan output, serta refleksi dan tindak lanjut. Data awal diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kebutuhan peserta didik mencakup bidang pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan masa depan, sementara penyelenggaraan layanan BK masih didominasi layanan responsif dan belum didukung administrasi yang tersusun secara sistematis. Pendampingan dilakukan melalui diskusi kolaboratif, penguatan pemahaman mengenai layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem, serta praktik penyusunan perangkat administrasi. Kegiatan menghasilkan Rencana Pelaksanaan Layanan, format laporan konseling individual dan kelompok, catatan perkembangan peserta didik, serta kerangka perencanaan program BK. Hasil tersebut menunjukkan terbentuknya fondasi awal untuk penyelenggaraan layanan BK yang lebih terencana dan terdokumentasi. Namun, keberlanjutan program tetap memerlukan implementasi perangkat, pendampingan kompetensi secara berkelanjutan, dukungan manajemen sekolah, kolaborasi lintas fungsi, serta evaluasi berkala berbasis kebutuhan peserta didik.

Kata kunci: administrasi; guru non-BK; layanan bimbingan dan konseling; penguatan kompetensi

Strengthening Guidance and Counseling Services through Administrative Mentoring for Non-Guidance-and-Counseling Teachers at SMP Satu Atap 1 Jatinagara

Abstract

Limited competence among teachers who perform Guidance and Counseling (GC) functions without a formal educational background in guidance and counseling may affect the quality of service planning, administration, and implementation in schools. This community service program aimed to strengthen guidance and counseling services through administrative mentoring for non-GC teachers at SMP Satu Atap 1 Jatinagara. The program employed a participatory mentoring approach involving the teacher responsible for GC functions, the school principal, and students. The activities were implemented through six stages: initial condition identification, needs mapping, mentoring planning, mentoring implementation, output development, and reflection and follow-up. Initial data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings showed that students' needs covered personal, social, learning, and future planning domains, while the existing GC services were still predominantly responsive and were not yet supported by systematically organized administrative procedures. The mentoring activities were conducted through collaborative discussions, reinforcement of understanding regarding basic services, responsive services, individual planning, and system support, as well as practical assistance in developing administrative tools. The program produced service implementation plans, individual and group counseling report formats, student development records, and a framework for GC program planning. These outcomes indicate the establishment of an initial foundation for more systematic, planned, and well-documented guidance and counseling services. However, program sustainability requires further implementation of the developed tools, continuous competency development, stronger school management support, cross-functional collaboration, and periodic evaluation based on students' needs.

Keywords: *administration; non-counseling teachers; guidance and counseling services; competency strengthening*

How to *Cite:* Pathmi, S. N., & Jamaludin, O. . (2016). Penguatan Layanan Bimbingan dan Konseling melalui Pendampingan Administratif bagi Guru Non-BK di SMP Satu Atap 1 Jatinagara. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, *8*(4), 420-436. https://doi.org/10.36312/sasambo.v8i3.6713

https://doi.org/10.36312/sasambo.v8i3.6713

Copyright© 2026, Pathim & Jamaludin
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan karena berfungsi membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan masa depan. Layanan BK tidak hanya berkaitan dengan penanganan peserta didik yang menghadapi masalah, tetapi juga mencakup fungsi pencegahan, pengembangan, perencanaan, dan dukungan terhadap proses pendidikan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, efektivitas layanan BK sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam merancang program yang sesuai kebutuhan peserta didik, kompetensi guru yang menjalankan fungsi BK, dukungan manajemen sekolah, serta keberadaan sistem administrasi dan evaluasi yang terstruktur. Penelusuran literatur menunjukkan bahwa kualitas layanan BK dipengaruhi secara simultan oleh faktor individu dan faktor sistemik, sehingga peningkatan layanan tidak dapat hanya dibebankan kepada guru BK sebagai pelaksana utama (Amalianingsih & Herdi, 2021; Nugroho et al., 2021; Bidayah et al., 2023; Randi, 2024; Barida & Muarifah, 2019; Junaidi et al., 2022).

Persoalan menjadi lebih kompleks pada sekolah yang belum memiliki guru dengan latar belakang pendidikan khusus Bimbingan dan Konseling. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan guru dalam memahami konsep dasar BK, melakukan asesmen kebutuhan, menyusun program, menentukan strategi layanan, melakukan konseling, serta melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Abdilah et al. (2023) serta Barida dan Muarifah (2019) menunjukkan bahwa guru BK dengan latar belakang non-BK dapat menghadapi kendala dalam perencanaan program ketika tidak memperoleh penguatan kompetensi yang memadai. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa layanan tidak dapat dikembangkan. Pelatihan terstruktur, pendampingan berkelanjutan, supervisi, dan kolaborasi lintas fungsi dapat membantu guru yang tidak berlatar belakang BK menjalankan perencanaan layanan secara lebih sistematis (Abdilah et al., 2023; Yondris et al., 2022; Asni et al., 2023; Siregar et al., 2023).

Administrasi BK juga menjadi bagian penting dalam persoalan tersebut. Administrasi yang mencakup asesmen kebutuhan, Rencana Pelaksanaan Layanan, pencatatan konseling individual dan kelompok, dokumentasi perkembangan peserta didik, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan instrumen yang mendukung kesinambungan program. Akan tetapi, administrasi dapat berubah menjadi sekadar formalitas ketika tidak terhubung dengan kebutuhan nyata peserta didik dan praktik profesional guru BK. Hamdi dan Pitriyani (2024), Yondris et al. (2022), Amalianingsih dan Herdi (2021), serta Rokimin dan Pangestu (2023) menunjukkan bahwa kendala administrasi sering berkaitan dengan keterbatasan waktu, minimnya pelatihan, beban kerja, dan kurangnya dukungan sistem. Oleh sebab itu, penguatan administrasi BK perlu

disertai dengan pengembangan kompetensi teknis, supervisi kepala sekolah, serta penyediaan fasilitas yang memungkinkan layanan dilaksanakan secara konsisten.

Selain aspek perencanaan dan administrasi, pelaksanaan layanan BK juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekolah. Guru yang menjalankan fungsi BK dengan latar belakang non-BK dapat menghadapi keterbatasan jam layanan, tanggung jawab tambahan di luar BK, kurangnya ruang khusus, dan terbatasnya sarana pendukung. Randi (2022, 2024), Asni et al. (2023), Siregar et al. (2023), dan Bidayah et al. (2023) menunjukkan bahwa layanan cenderung berjalan lebih baik ketika kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, tenaga administrasi, dan orang tua terlibat dalam sistem dukungan yang terkoordinasi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi individu saja tidak cukup. Tanpa kebijakan sekolah, supervisi, fasilitas, dan budaya kerja kolaboratif, dampak pendampingan terhadap kualitas layanan cenderung terbatas (Yondris et al., 2022; Fadhlullah et al., 2023; Ardimen, 2018).

Perspektif tersebut sejalan dengan model BK komprehensif yang menempatkan layanan dalam empat komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Layanan dasar berfungsi memberikan dukungan pencegahan, informasi, dan pengembangan bagi seluruh peserta didik. Layanan responsif diarahkan pada peserta didik yang menghadapi masalah spesifik dan membutuhkan bantuan lebih segera. Perencanaan individual membantu peserta didik merancang perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan kariernya, sedangkan dukungan sistem mencakup manajemen program, kolaborasi, supervisi, pengembangan profesional, serta kebijakan yang memastikan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan (Yondris et al., 2022; Rahmawati et al., 2023; Sari, 2021; Wibowo, 2017).

Implementasi keempat komponen tersebut penting karena kebutuhan peserta didik tidak bersifat tunggal. Kebutuhan pribadi dan sosial memerlukan penguatan kemampuan adaptasi, pengelolaan diri, dan hubungan interpersonal. Kebutuhan belajar berkaitan dengan motivasi, hambatan akademik, dan strategi belajar. Sementara itu, kebutuhan perencanaan masa depan mencakup pilihan pendidikan lanjutan dan pengembangan karier. Program BK yang hanya bersifat responsif terhadap siswa yang sedang mengalami masalah akan sulit menjangkau keseluruhan kebutuhan tersebut. Sebaliknya, layanan yang mengintegrasikan pencegahan, respons terhadap masalah, perencanaan individual, dan dukungan sistem memiliki peluang lebih besar untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh (Yondris et al., 2022; Rahmawati et al., 2023; Sari, 2021).

Konteks tersebut ditemukan pula di SMP Satu Atap 1 Jatinagara. Observasi dan komunikasi awal menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kebutuhan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan masa depan. Beberapa kebutuhan yang muncul berkaitan dengan motivasi belajar, pengembangan potensi, pendidikan lanjutan, etika bermedia sosial, serta pergaulan remaja. Di sisi lain, pengalaman peserta didik terhadap layanan BK belum merata. Sebagian peserta didik memahami guru BK sebagai pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjadi tempat bercerita, tetapi terdapat siswa yang belum pernah mengikuti layanan BK secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap fungsi ideal BK dan pengalaman aktual siswa dalam memperoleh layanan secara terstruktur.

Identifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa guru yang menjalankan fungsi BK memiliki latar belakang pendidikan yang bukan secara khusus berasal dari bidang Bimbingan dan Konseling. Administrasi layanan juga belum tersusun secara lengkap dan sistematis. Program BK, instrumen identifikasi kebutuhan, satuan layanan, laporan konseling individual dan kelompok, catatan pelaksanaan, serta evaluasi masih memerlukan penataan dan pengembangan. Selain itu, layanan lebih banyak dilaksanakan ketika terdapat peserta didik yang mengalami permasalahan, sedangkan layanan pencegahan dan pengembangan belum sepenuhnya berjalan secara terencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi sekolah bukan hanya persoalan kompetensi individual guru, tetapi juga berkaitan dengan sistem perencanaan, administrasi, dukungan manajerial, dan pola penyelenggaraan layanan.

Beberapa penelitian telah membahas kompetensi guru BK, administrasi BK, layanan komprehensif, dan dukungan sistem sekolah. Namun, masih diperlukan pendekatan praktis yang mengintegrasikan identifikasi kebutuhan peserta didik, penguatan pemahaman guru non-latar BK, penyusunan administrasi, dan pengenalan empat komponen layanan BK dalam satu kegiatan pendampingan yang kontekstual. Di sinilah posisi kegiatan pengabdian ini. Fokus kegiatan bukan menggantikan fungsi profesional konselor, tetapi memberikan dukungan awal agar guru yang menjalankan fungsi BK memiliki dasar yang lebih sistematis dalam merencanakan, mendokumentasikan, dan melaksanakan layanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Satu Atap 1 Jatinagara melalui identifikasi kebutuhan peserta didik, pendampingan administrasi, serta penguatan pemahaman guru mengenai layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi sekolah untuk mengembangkan layanan BK yang lebih terencana, terdokumentasi, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan tetap menempatkan pembinaan berkelanjutan dan dukungan sistem sekolah sebagai unsur penting dalam keberlanjutan program.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Satu Atap 1 Jatinagara, Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan dirancang menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif, yaitu pendekatan yang menempatkan pihak sekolah tidak hanya sebagai penerima kegiatan, tetapi terlibat secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, diskusi, penyusunan perangkat, dan refleksi hasil pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan perangkat administrasi, tetapi juga pemahaman mengenai fungsi BK, pola pelaksanaan layanan, serta kebutuhan peserta didik yang beragam.

Sasaran utama kegiatan adalah guru yang menjalankan fungsi Bimbingan dan Konseling, dengan kepala sekolah sebagai mitra utama dalam penguatan dukungan sistem. Peserta didik juga dilibatkan pada tahap identifikasi kebutuhan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman dan kebutuhan mereka terhadap layanan BK. Identifikasi awal melibatkan enam peserta didik, yang terdiri atas masing-masing dua peserta didik dari kelas VII, VIII, dan IX, serta guru yang menjalankan fungsi BK dan

kepala sekolah sebagai informan utama. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan dan penerimaan layanan BK di sekolah.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi enam tahap utama, yaitu identifikasi kondisi awal, pemetaan kebutuhan, perencanaan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, Output pendampingan, serta refleksi dan tindak lanjut. Adapun tahapan di sajikan dalam visualisasi berikut



Gambar 1. Skema pelaksanaan pendampingan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) terdiri atas enam tahap yang saling berurutan, yaitu: (1) identifikasi kondisi awal melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; (2) pemetaan kebutuhan peserta didik, kondisi guru, dan administrasi BK; (3) perencanaan pendampingan dengan menentukan prioritas, materi, dan perangkat layanan; (4) pelaksanaan pendampingan melalui diskusi kolaboratif, penguatan konsep BK, dan praktik penyusunan perangkat; (5) penyusunan output berupa RPL, laporan konseling individual dan kelompok, catatan perkembangan peserta didik, serta kerangka program BK; dan (6) refleksi dan tindak lanjut melalui peninjauan perangkat, identifikasi kebutuhan perbaikan, serta perencanaan implementasi dan evaluasi berkala. Skema ini menunjukkan bahwa pendampingan dilaksanakan secara bertahap dari identifikasi kebutuhan hingga tindak lanjut untuk mendukung penguatan layanan BK yang lebih terencana dan sistematis.

Tahap pertama adalah identifikasi kondisi awal layanan BK. Kegiatan dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan

pada kondisi penyelenggaraan layanan, ketersediaan perangkat administrasi, serta pola keterlibatan guru dalam menjalankan fungsi BK. Wawancara dengan peserta didik digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman mereka dalam menerima layanan serta kebutuhan pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan masa depan. Sementara itu, wawancara dengan guru dan kepala sekolah diarahkan pada permasalahan penyelenggaraan layanan, ketersediaan perangkat, hambatan pelaksanaan, dan kebutuhan penguatan kompetensi. Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut sesuai dengan prosedur pengumpulan informasi awal yang digunakan dalam kegiatan.

Tahap kedua adalah pemetaan kebutuhan layanan dan administrasi BK. Informasi yang diperoleh dari tahap awal dikelompokkan ke dalam dua fokus. Fokus pertama adalah kebutuhan peserta didik yang mencakup bidang pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan masa depan. Fokus kedua adalah kebutuhan sistem layanan, seperti Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), format laporan konseling individual dan kelompok, catatan perkembangan peserta didik, serta perencanaan dan evaluasi program BK. Pemetaan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan materi dan perangkat yang menjadi prioritas pendampingan.

Tahap ketiga adalah perencanaan kegiatan pendampingan. Tim pengabdian bersama pihak sekolah menentukan aspek yang perlu diperkuat dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual sekolah. Pendampingan diarahkan pada dua bidang utama, yaitu penguatan pemahaman mengenai layanan BK komprehensif dan penataan perangkat administrasi. Materi layanan BK mencakup layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem, sedangkan aspek administrasi difokuskan pada perangkat yang secara langsung dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan.

Tahap keempat adalah pelaksanaan pendampingan. Pendampingan dilakukan melalui diskusi kolaboratif, penjelasan konsep, demonstrasi, serta praktik penyusunan perangkat. Guru tidak hanya menerima contoh format, tetapi dilibatkan dalam proses menyesuaikan perangkat dengan kebutuhan sekolah. Produk yang disusun meliputi RPL atau satuan layanan, format laporan konseling individual, format laporan konseling kelompok, catatan perkembangan peserta didik, dan kerangka perencanaan program BK. Pendekatan ini dimaksudkan agar perangkat administrasi tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, serta evaluasi layanan.

Tahap kelima adalah refleksi dan tindak lanjut. Tim dan pihak sekolah meninjau kembali perangkat yang telah disusun, mendiskusikan aspek yang masih perlu diperbaiki, serta menentukan kebutuhan implementasi selanjutnya. Evaluasi pada tahap kegiatan ini bersifat formatif dan berfokus pada ketercapaian output awal, khususnya tersusunnya perangkat administrasi dan teridentifikasinya kebutuhan pengembangan layanan. Evaluasi efektivitas terhadap perubahan perilaku atau perkembangan peserta didik belum dilakukan karena perangkat yang dihasilkan masih memerlukan implementasi dan pemantauan berkelanjutan.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan pengabdian di SMP Satu Atap 1 Jatinagara difokuskan pada penguatan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) melalui identifikasi kebutuhan peserta didik,

pemetaan kondisi awal layanan BK, pendampingan administrasi, dan penguatan pemahaman guru yang menjalankan fungsi BK. Kegiatan melibatkan mahasiswa, kepala sekolah, guru yang menjalankan fungsi BK, serta peserta didik. Berdasarkan proses observasi, wawancara, dokumentasi, dan pendampingan, diperoleh beberapa hasil utama sebagai berikut.

Identifikasi Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling

Tahap awal pengabdian dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan peserta didik serta kondisi penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kebutuhan peserta didik dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yaitu belajar, pribadi, sosial, dan perencanaan masa depan.

Pada bidang belajar, peserta didik masih membutuhkan penguatan motivasi belajar dan arahan terkait pendidikan lanjutan. Pada bidang pribadi dan sosial, perhatian terutama diarahkan pada persoalan pergaulan remaja dan penggunaan media sosial secara lebih bertanggung jawab. Sementara itu, kebutuhan terkait masa depan berkaitan dengan pentingnya memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri serta mempersiapkan pilihan pendidikan berikutnya.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Awal Kebutuhan Peserta Didik

Bidang Layanan	**Kebutuhan yang Teridentifikasi**	**Arah Layanan yang Dibutuhkan**
Belajar	Motivasi belajar dan penguatan proses belajar	Bimbingan belajar dan motivasi
Pribadi	Pemahaman dan pengembangan diri	Bimbingan pribadi
Sosial	Etika bermedia sosial dan pergaulan remaja	Bimbingan sosial
Perencanaan masa depan	Pendidikan lanjutan dan pengembangan potensi	Bimbingan perencanaan pendidikan dan masa depan

Hasil wawancara juga menunjukkan kondisi yang cukup penting dalam penyelenggaraan layanan BK. Peserta didik pada dasarnya telah mempunyai pemahaman umum mengenai fungsi guru BK. Guru BK dipersepsikan sebagai pihak yang dapat membantu ketika siswa menghadapi masalah, menjadi tempat untuk bercerita dan bertanya, membantu mencari solusi, serta mendukung perkembangan peserta didik. Akan tetapi, terdapat peserta didik yang menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan layanan BK secara langsung.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman peserta didik mengenai fungsi ideal BK dan pengalaman mereka dalam memperoleh layanan secara terstruktur. Kondisi ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan fokus pendampingan, khususnya pada penataan sistem layanan agar kegiatan BK tidak hanya diberikan ketika muncul permasalahan, tetapi juga dapat diarahkan pada layanan pencegahan dan pengembangan peserta didik.

Kondisi Awal Penyelenggaraan Layanan BK

Hasil observasi dan komunikasi dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa guru yang menjalankan fungsi BK memiliki latar belakang pendidikan yang bukan secara

khusus berasal dari bidang Bimbingan dan Konseling. Kondisi tersebut menyebabkan masih diperlukan penguatan mengenai konsep layanan, peran guru BK, perencanaan program, administrasi, serta pelaksanaan layanan kepada peserta didik.

Identifikasi terhadap administrasi juga menunjukkan bahwa beberapa perangkat pendukung layanan belum tersusun secara lengkap dan sistematis. Kondisi awal perangkat administrasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Awal Perangkat Administrasi Layanan BK

Perangkat/Aspek Layanan	**Kondisi Awal**
Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Satuan Layanan	Memerlukan penyusunan dan penataan
Laporan konseling individual	Belum tersusun secara sistematis
Laporan konseling kelompok	Belum tersusun secara sistematis
Catatan perkembangan peserta didik	Memerlukan penyusunan
Perencanaan program BK	Belum terdokumentasi secara sistematis
Evaluasi layanan	Masih memerlukan pengembangan
Pelaksanaan layanan	Lebih banyak dilakukan berdasarkan kebutuhan/permasalahan yang muncul

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan sekolah bukan hanya berkaitan dengan pemberian layanan langsung kepada peserta didik, tetapi juga penguatan sistem administrasi yang mendukung keberlangsungan layanan. Pelaksanaan BK sebelumnya lebih banyak dilakukan ketika terdapat siswa yang menghadapi permasalahan, sedangkan layanan yang bersifat preventif dan pengembangan belum sepenuhnya direncanakan secara sistematis.

Pelaksanaan Pendampingan Guru yang Menjalankan Fungsi BK

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan kepada guru yang menjalankan fungsi BK. Pendampingan dilaksanakan melalui diskusi kolaboratif dan praktik penyusunan perangkat administrasi. Pendekatan ini memungkinkan pihak sekolah terlibat secara langsung dalam membahas kebutuhan layanan dan menyiapkan perangkat yang dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan BK.

Materi pendampingan mencakup pemahaman mengenai layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada penanganan peserta didik yang mengalami masalah, tetapi juga pada pentingnya layanan yang bersifat pencegahan, pengembangan potensi, serta perencanaan pendidikan dan masa depan peserta didik.

Pendampingan administrasi dilakukan melalui praktik bersama dalam menyiapkan perangkat yang sebelumnya belum tersedia atau masih membutuhkan penataan. Fokus kegiatan bukan hanya memberikan contoh dokumen, tetapi menempatkan perangkat administrasi sebagai bagian dari perencanaan dan dokumentasi layanan BK.

Produk yang Dihasilkan melalui Pendampingan

Hasil konkret kegiatan pengabdian adalah tersusunnya beberapa perangkat dasar yang dapat digunakan pihak sekolah dalam pelaksanaan layanan BK. Perangkat tersebut

meliputi Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) atau satuan layanan, format laporan konseling individual, format laporan konseling kelompok, dan catatan perkembangan peserta didik. Selain itu, kegiatan juga mencakup diskusi mengenai perencanaan program BK berdasarkan kebutuhan peserta didik.

Tabel 3. Output Pendampingan Administrasi Layanan BK

No.	Output Pendampingan	Fungsi
1	RPL/Satuan Layanan Bimbingan	Pedoman pelaksanaan layanan kepada peserta didik
2	Format laporan konseling individual	Dokumentasi proses layanan individual
3	Format laporan konseling kelompok	Dokumentasi pelaksanaan layanan kelompok
4	Catatan perkembangan peserta didik	Pencatatan perkembangan peserta didik selama layanan
5	Kerangka perencanaan program BK	Dasar penyusunan program sesuai kebutuhan peserta didik

Tersusunnya perangkat tersebut menjadi hasil awal yang penting karena sebelumnya administrasi layanan belum terdokumentasi secara sistematis. Perangkat yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi guru dan sekolah untuk menata pelaksanaan, pencatatan, serta evaluasi layanan secara lebih terarah.

Hasil kegiatan pengabdian di SMP Satu Atap 1 Jatinagara menunjukkan bahwa penguatan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya menyediakan layanan konseling ketika peserta didik menghadapi masalah. Kondisi awal di sekolah memperlihatkan tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu kebutuhan peserta didik yang beragam dalam bidang belajar, pribadi, sosial, dan perencanaan masa depan; keterbatasan kompetensi teknis karena guru yang menjalankan fungsi BK tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus BK; serta administrasi dan perencanaan layanan yang belum tersusun secara sistematis. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penguatan layanan BK perlu dilakukan pada dua level sekaligus, yaitu kompetensi individu guru dan sistem penyelenggaraan layanan di sekolah.

Salah satu temuan penting kegiatan ini adalah bahwa guru yang menjalankan fungsi BK memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dari bidang Bimbingan dan Konseling. Pada saat yang sama, sejumlah perangkat utama, seperti Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL), laporan konseling individual dan kelompok, serta catatan perkembangan peserta didik, masih memerlukan penataan. Kondisi tersebut menjadi dasar rasional bagi dilaksanakannya pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan dokumen, tetapi juga pada penguatan pemahaman mengenai fungsi dan mekanisme layanan BK.

Dalam konteks ini, pendampingan administrasi memiliki posisi yang penting. Administrasi BK bukan hanya kegiatan pencatatan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban layanan. Hamdi dan Pitriyani (2024) menunjukkan bahwa pendampingan administrasi BK dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengelola kebutuhan administratif yang mendukung penyelenggaraan program. Administrasi yang mencakup asesmen kebutuhan, evaluasi layanan, pengelolaan kasus, kunjungan rumah,

laporan konseling individual, dan laporan kelompok dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan kebutuhan peserta didik dengan program BK yang dirancang sekolah.

Temuan kegiatan ini bergerak dalam arah yang sama. Pendampingan menghasilkan beberapa perangkat dasar, antara lain RPL atau satuan layanan, format laporan konseling individual, format laporan konseling kelompok, dan catatan perkembangan peserta didik. Tersusunnya perangkat tersebut dapat dipandang sebagai tahap awal menuju pengelolaan layanan yang lebih sistematis. Namun, keberadaan perangkat administratif saja belum dapat dijadikan indikator bahwa kualitas layanan BK telah meningkat secara substantif. Dokumen dapat memenuhi fungsi administratif tanpa otomatis memperbaiki kualitas komunikasi konseling, asesmen masalah, pengambilan keputusan, atau tindak lanjut terhadap kebutuhan peserta didik.

Nuansa ini penting karena Hamdi dan Pitriyani (2024), Yondris et al. (2022), serta Fadhlullah et al. (2023) sama-sama menekankan bahwa penguatan administrasi perlu disertai peningkatan kompetensi teknis dan profesional. Dengan kata lain, administrasi seharusnya berfungsi sebagai alat yang membantu layanan, bukan sebagai tujuan akhir pendampingan. Jika guru hanya diarahkan mengisi format RPL atau laporan tanpa memahami dasar asesmen, prinsip konseling, etika, teknik komunikasi, serta evaluasi layanan, maka peningkatan yang terjadi berisiko bersifat prosedural.

Karena guru yang menjalankan fungsi BK pada lokasi pengabdian bukan lulusan bidang BK, kebutuhan pengembangan kompetensi menjadi lebih mendasar. Muadzimah (2022) dan Fadhlullah et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas layanan BK berkaitan dengan kompetensi profesional dan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan oleh kepala sekolah, pengawas BK, dan rekan sejawat dapat membantu guru memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan demikian, pendampingan yang telah dilakukan sebaiknya tidak berhenti pada penyusunan administrasi, tetapi dilanjutkan dengan penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan pribadi sebagaimana juga ditekankan Afdal (2015), Asni et al. (2023), Pranowo dan Febrianto (2023), serta Siregar et al. (2023).

Hasil identifikasi awal memperlihatkan bahwa layanan BK di sekolah cenderung berjalan ketika terdapat peserta didik yang mengalami permasalahan. Sementara itu, layanan pencegahan, pengembangan, dan perencanaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara terstruktur. Pola seperti ini membuat BK mudah dipersepsikan sebagai layanan untuk siswa bermasalah, padahal fungsi BK secara konseptual jauh lebih luas.

Literatur mengenai BK komprehensif menempatkan layanan ke dalam empat komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem (Yondris et al., 2022). Keempat komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling terkait. Layanan dasar diarahkan pada seluruh peserta didik melalui kegiatan pencegahan, pengembangan, dan asesmen kebutuhan umum. Layanan responsif ditujukan kepada peserta didik yang menghadapi masalah tertentu dan membutuhkan bantuan lebih segera. Perencanaan individual membantu peserta didik merancang perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan kariernya. Adapun dukungan sistem memastikan bahwa seluruh layanan tersebut dapat berjalan melalui pengelolaan program, kebijakan sekolah, kolaborasi, evaluasi, serta pengembangan profesional.

Hasil identifikasi kebutuhan siswa pada kegiatan ini memperlihatkan adanya relevansi langsung dengan pendekatan tersebut. Kebutuhan motivasi belajar dapat

direspons melalui layanan dasar atau bimbingan belajar; persoalan pergaulan dan media sosial dapat ditangani melalui kombinasi layanan dasar dan responsif; sedangkan kebutuhan mengenai pendidikan lanjutan serta masa depan berkaitan erat dengan perencanaan individual. Artinya, heterogenitas kebutuhan siswa justru memperkuat alasan bahwa sekolah perlu bergerak dari layanan yang didominasi respons terhadap masalah menuju program BK yang lebih komprehensif.

Namun, penerapan empat komponen tersebut tidak cukup hanya dengan mengadopsi struktur program secara formal. Yondris et al. (2022), Randi (2024), dan Ardimen (2018) menekankan pentingnya integrasi layanan BK dengan sistem sekolah secara lebih luas. Program yang terstruktur seharusnya mempunyai dasar kebutuhan yang jelas, pembagian peran antar-personel, jadwal layanan, mekanisme rujukan, dokumentasi, monitoring, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, pendampingan di SMP Satu Atap 1 Jatinagara sebaiknya dipandang sebagai tahap awal pembangunan sistem, bukan sebagai penyelesaian seluruh persoalan layanan BK.

Salah satu aspek yang sering kurang mendapat perhatian dalam program pendampingan guru adalah asumsi bahwa peningkatan kompetensi individu otomatis menghasilkan peningkatan kualitas layanan. Literatur yang disampaikan justru menunjukkan pandangan yang lebih kompleks. Yondris et al. (2022), Fadhlullah et al. (2023), Randi (2022), dan Ardimen (2018) menekankan bahwa kualitas layanan BK sangat bergantung pada dukungan sistem dan keterlibatan personel sekolah.

Dalam konteks SMP Satu Atap 1 Jatinagara, keterlibatan kepala sekolah dalam identifikasi kebutuhan dan proses pendampingan merupakan modal awal yang penting. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi izin, tetapi idealnya menjadi pihak yang memastikan bahwa layanan BK memiliki ruang dalam perencanaan sekolah, memperoleh alokasi waktu, fasilitas, dan dukungan kebijakan. Jika sekolah menghendaki layanan dasar, responsif, perencanaan individual, serta dukungan sistem berjalan secara konsisten, maka guru yang menjalankan fungsi BK perlu memperoleh legitimasi, waktu kerja, akses informasi, dan dukungan dari wali kelas serta guru mata pelajaran.

Literatur juga menunjukkan adanya kendala praktis yang sering tidak terselesaikan melalui pelatihan kompetensi semata. Amalianingsih dan Herdi (2021), Fawri dan Neviyarni (2021), serta Margaretha et al. (2021) mengidentifikasi keterbatasan jam layanan, beban tugas di luar BK, serta ketersediaan fasilitas sebagai faktor yang dapat menghambat implementasi program. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan normatif agar program BK disusun secara lengkap dan realitas operasional sekolah.

Pada satu sisi, sekolah membutuhkan RPL, dokumentasi, evaluasi, laporan kasus, asesmen kebutuhan, dan berbagai perangkat lain untuk menjamin akuntabilitas. Pada sisi lain, jika guru yang menjalankan fungsi BK juga memiliki beban mengajar atau tugas administratif lain dan tidak memiliki ruang layanan yang memadai, tuntutan dokumentasi yang terlalu besar justru berpotensi membebani guru tanpa menghasilkan perbaikan layanan secara proporsional. Oleh sebab itu, administrasi yang dikembangkan melalui pendampingan perlu dibuat fungsional, sederhana, dan benar-benar digunakan untuk mendukung keputusan layanan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan model manajemen POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Asni et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan

fungsi manajemen dalam layanan BK masih membutuhkan penguatan. Dalam konteks pengabdian ini, planning dapat dilakukan melalui asesmen kebutuhan dan penyusunan RPL, organizing melalui pembagian peran kepala sekolah, guru, wali kelas, dan pihak terkait, actuating melalui pelaksanaan layanan, sedangkan controlling dilakukan melalui pencatatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kerangka ini dapat membantu sekolah agar administrasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari siklus pengelolaan program.

Penguatan kompetensi guru non-latar BK juga memerlukan jejaring profesional. Salah satu pilihan praktis adalah keterlibatan aktif dalam Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Forum semacam ini dapat menjadi ruang untuk mendapatkan dukungan rekan sejawat, bertukar perangkat, mendiskusikan kasus dengan tetap menjaga etika dan kerahasiaan, serta mengakses praktik baik dari guru BK yang memiliki kompetensi lebih kuat. Hamdi dan Pitriyani (2024), Muadzimah (2022), Yondris et al. (2022), dan Randi (2022) menunjukkan pentingnya kolaborasi dan dukungan profesional dalam penguatan sistem BK.

Bagi sekolah yang belum memiliki guru dengan latar belakang BK, pembinaan semacam ini bahkan lebih penting. Pendampingan dari mahasiswa dapat memberikan dukungan awal, tetapi keberlanjutan program tidak dapat bergantung pada keberadaan mahasiswa KKN. Setelah program selesai, sekolah memerlukan mekanisme internal dan eksternal yang dapat mempertahankan praktik yang telah dibangun. Karena itu, kolaborasi dengan pengawas BK, MGBK, perguruan tinggi, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, serta institusi yang relevan perlu dikembangkan secara lebih sistematis.

Orang tua juga memiliki posisi penting, khususnya dalam layanan perencanaan individual dan penanganan masalah yang memerlukan dukungan di rumah. Dalam konteks perencanaan pendidikan lanjutan, keterlibatan keluarga dapat membantu memastikan bahwa pilihan peserta didik mempertimbangkan aspirasi, kemampuan, sumber daya, dan kondisi sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, program BK tidak berhenti pada interaksi guru dan siswa, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas.

Perkembangan teknologi juga memberi peluang sekaligus tantangan baru bagi penguatan layanan BK. Fitri et al. (2023), Rahmawati et al. (2023), dan Ardiyan et al. (2022) menunjukkan bahwa teknologi digital dapat mendukung asesmen kebutuhan, pengelolaan administrasi, pengembangan kompetensi guru, dan akses terhadap berbagai sumber belajar. Bagi sekolah yang masih membangun sistem administrasi BK, penggunaan perangkat digital sederhana dapat membantu penyimpanan data, penyusunan program, dokumentasi layanan, serta monitoring tindak lanjut.

Meskipun demikian, digitalisasi tidak boleh diposisikan sekadar sebagai penggantian dokumen kertas menjadi dokumen elektronik. Data BK sering kali bersifat sensitif karena dapat memuat informasi pribadi, masalah keluarga, kesehatan psikososial, atau catatan konseling siswa. Oleh sebab itu, penggunaan media digital perlu memperhatikan kerahasiaan, keamanan data, pembatasan akses, dan etika profesional. Rahmawati et al. (2023) serta Fitri et al. (2023) menekankan bahwa peningkatan kompetensi teknologi guru perlu berjalan bersama pemahaman terhadap aspek privasi dan aksesibilitas.

Pada konteks SMP Satu Atap 1 Jatinagara, adaptasi digital sebaiknya dilakukan secara bertahap. Prioritas pertama bukan membangun sistem teknologi yang kompleks,

tetapi memastikan bahwa guru mampu menggunakan perangkat administrasi secara konsisten. Setelah itu, format asesmen kebutuhan, RPL, laporan layanan, dan evaluasi dapat mulai dikelola melalui sistem digital sederhana yang sesuai dengan kapasitas sekolah.

Hasil pengabdian memberikan beberapa implikasi praktis. Pertama, sekolah perlu mempertahankan asesmen kebutuhan sebagai titik awal perencanaan program. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan peserta didik tidak hanya berkaitan dengan masalah pribadi, tetapi juga motivasi belajar, hubungan sosial, etika bermedia sosial, pengembangan potensi, dan pendidikan lanjutan. Program BK yang tidak didasarkan pada kebutuhan tersebut berisiko menjadi serangkaian kegiatan administratif tanpa keterkaitan langsung dengan persoalan siswa.

Kedua, guru yang menjalankan fungsi BK tetapi tidak memiliki latar belakang BK membutuhkan program pembinaan jangka panjang. Pendampingan administrasi merupakan langkah awal yang relevan, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan kompetensi dalam asesmen, komunikasi konseling, etika, perencanaan individual, layanan kelompok, evaluasi, dan penanganan kasus.

Ketiga, kepala sekolah perlu menempatkan BK sebagai bagian dari program sekolah, bukan tanggung jawab individual guru tertentu. Dukungan terhadap waktu layanan, fasilitas, koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, serta evaluasi program merupakan bagian dari tanggung jawab manajerial. Temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi individual tanpa penguatan lingkungan organisasi cenderung memberikan dampak yang terbatas (Yondris et al., 2022; Fadhlullah et al., 2023; Ardimen, 2018).

Keempat, sekolah perlu membangun mekanisme evaluasi berkelanjutan. Perangkat yang telah disusun dalam kegiatan ini masih harus diuji melalui implementasi langsung. Evaluasi selanjutnya dapat mencakup keterlaksanaan RPL, keteraturan dokumentasi, keterjangkauan layanan oleh peserta didik, kesesuaian program dengan kebutuhan siswa, serta refleksi guru dan kepala sekolah. Fadhlullah et al. (2023), Fawri dan Neviyarni (2021), dan Hidayat (2021) menempatkan evaluasi dan akuntabilitas sebagai unsur penting untuk memastikan bahwa program BK dilaksanakan sesuai standar dan kebutuhan sekolah.

Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak seharusnya ditafsirkan sebagai bukti bahwa layanan BK di SMP Satu Atap 1 Jatinagara telah sepenuhnya optimal. Bukti yang tersedia lebih tepat menunjukkan bahwa sekolah telah memperoleh fondasi awal untuk membangun layanan yang lebih sistematis melalui identifikasi kebutuhan, penataan administrasi, penguatan pemahaman peran BK, serta penyusunan perangkat layanan. Keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada implementasi perangkat, peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi lintas fungsi, dukungan infrastruktur, serta evaluasi berbasis data. Pendekatan yang menyeimbangkan penguatan kompetensi individu dan dukungan sistem menjadi lebih realistis dibandingkan menempatkan pendampingan administratif sebagai satu-satunya solusi bagi persoalan penyelenggaraan BK di sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui pendampingan administratif bagi guru non-BK di SMP Satu Atap 1 Jatinagara memberikan dasar awal bagi penguatan layanan Bimbingan dan

Konseling yang lebih terencana, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Identifikasi awal menunjukkan bahwa kebutuhan peserta didik mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan masa depan, sementara pelaksanaan layanan BK masih cenderung bersifat responsif dan belum didukung oleh perangkat administrasi yang tersusun secara sistematis. Melalui pendampingan partisipatif, guru yang menjalankan fungsi BK memperoleh penguatan mengenai layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem, sekaligus terlibat dalam penyusunan perangkat administrasi berupa Rencana Pelaksanaan Layanan, format laporan konseling individual dan kelompok, catatan perkembangan peserta didik, serta kerangka perencanaan program BK. Capaian kegiatan ini lebih tepat dipandang sebagai penguatan fondasi layanan daripada bukti bahwa layanan BK telah sepenuhnya optimal. Keberlanjutan program masih memerlukan penerapan perangkat secara konsisten, pengembangan kompetensi guru non-BK secara berkelanjutan, supervisi dan dukungan manajerial kepala sekolah, kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, serta jejaring profesional BK. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat dan program yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan peserta didik dan mendukung peningkatan kualitas layanan BK secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, penguatan layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Satu Atap 1 Jatinagara perlu dilanjutkan melalui beberapa langkah yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Pertama, perangkat administrasi yang telah disusun, seperti Rencana Pelaksanaan Layanan, format laporan konseling individual dan kelompok, catatan perkembangan peserta didik, serta kerangka program BK, perlu diterapkan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala agar benar-benar berfungsi sebagai alat pendukung layanan, bukan hanya sebagai kelengkapan administratif.

Kedua, guru yang menjalankan fungsi BK tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan BK perlu memperoleh pendampingan lanjutan yang mencakup kompetensi perencanaan program, asesmen kebutuhan, komunikasi konseling, etika layanan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pendampingan sebaiknya melibatkan kepala sekolah, pengawas BK, perguruan tinggi, serta forum profesional seperti MGBK agar proses penguatan kompetensi tidak berhenti setelah kegiatan pengabdian selesai.

Ketiga, sekolah perlu memperkuat dukungan sistem melalui pengalokasian waktu layanan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kolaborasi antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, tenaga administrasi, dan orang tua. Keempat, pengembangan layanan BK perlu diarahkan pada penerapan empat komponen utama, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Evaluasi lanjutan juga diperlukan untuk menilai keterlaksanaan program, relevansi layanan terhadap kebutuhan peserta didik, serta perkembangan kualitas layanan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASI

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa atas dukungan akademik dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Sekolah, guru yang menjalankan fungsi Bimbingan dan Konseling, serta peserta didik SMP Satu

Atap 1 Jatinagara atas keterbukaan, partisipasi, dan kerja sama selama proses identifikasi kebutuhan, pendampingan, penyusunan perangkat administrasi, serta refleksi kegiatan. Dukungan seluruh pihak telah memberikan kontribusi penting terhadap terlaksananya kegiatan dan penguatan awal layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah, A. M., Ristanti, R. N., Mufida, R. Z., Kulsum, S., & Farida, N. A. (2023). Kinerja bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah. Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam, 103–113. https://doi.org/10.61220/ri.v1i2.0241

Afdal, A. (2015). Kolaboratif: Kerangka kerja konselor masa depan. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.29210/12400

Amalianingsih, R., & Herdi, H. (2021). Studi literatur: Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan. Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 5(1), 50. https://doi.org/10.30598/jbkt.v5i1.1071

Ardimen, A. (2018). Visi baru konselor sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah dan madrasah. Jurnal Konseling Indonesia, 4(1), 22–29. https://doi.org/10.21067/jki.v4i1.2733

Ardiyan, L., Milfayetty, S., Purba, S., & Lubis, M. J. (2022). Pengembangan model manajemen pelatihan peningkatan kompetensi profesional guru BK terintegrasi akun Belajar.Id. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 833–844. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.446

Asni, A., Dasalinda, D., & Chairunnisa, D. (2023). Penerapan fungsi manajemen POAC (planning, organizing, actuating, and controlling) dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 9(1), 357–364. https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i1.840

Barida, M., & Muarifah, A. (2019). Perbedaan kinerja guru bimbingan dan konseling dalam menyelenggarakan konseling individual ditinjau dari latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja. Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling, 4(1), 22. https://doi.org/10.17977/um001v4i12019p022

Bidayah, A., Syukur, Y., & Ahmad, R. (2023). Kendala pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah serta solusinya. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(4), 120–125. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17249

Fadhlullah, Z., Ahmad, R., & Syukur, Y. (2023). Peran pengawas dalam peningkatan pelayanan bimbingan konseling di madrasah. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(4), 126–137. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.17019

Fawri, A., & Neviyarni, N. (2021). Konsep manajemen bimbingan dan konseling. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(1), 196–202. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.266

Fitri, N., Maftuhah, S., Hapni, E., & Dasril, D. (2023). Tantangan dan peluang dalam manajemen layanan bimbingan dan konseling di era digital. Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 8(4), 635–644. https://doi.org/10.31604/ristekdik.2023.v8i4.635-644

Hamdi, M., & Pitriyani, P. (2024). Pendampingan administrasi bimbingan konseling dalam mendukung layanan bimbingan konseling di SMPN 7 Muaro Jambi. Jurnal

Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural, 2(1), 11–16. https://doi.org/10.57152/batik.v2i1.1069

Hidayat, R. (2021). Implementasi model integrasi bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan penerapannya di sekolah dan madrasah. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 9(1), 56. https://doi.org/10.29210/145500

Junaidi, J., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2022). Pelaksanaan bimbingan dan konseling dari perspektif tindakan sosial. Naradidik: Journal of Education and Pedagogy, 1(3), 167–173. https://doi.org/10.24036/nara.v1i3.38

Margaretha, D., Erlinda, M., & Doni, Y. D. (2021). Kinerja guru bimbingan konseling di Kota Kupang menurut persepsi kepala sekolah. Sebatik, 25(2), 449–459. https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1651

Muadzimah, Z. (2022). Analisis kinerja guru bimbingan konseling SMA/SMK di Surakarta. Dharmas Education Journal (DE_Journal), 3(1), 103–111. https://doi.org/10.56667/dejournal.v3i1.657

Nugroho, D. A., Khasanah, D. N., Pangestuti, I. A. I., & Kholili, M. I. (2021). Problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA: A systematic literature review (SLR). Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 5(1), 87–96. https://doi.org/10.26539/teraputik.51647

Pranowo, T. A., & Febrianto, A. (2023). Group counseling training with a REBT approach for guidance and counseling teachers at the MTs in Magelang Regency. Community Empowerment, 8(5), 707–715. https://doi.org/10.31603/ce.7770

Rahmawati, I., Rinawati, Ihsan, M., Lestari, H., & Supriatna, N. (2023). Pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tenjolaya. Sahid Mengabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor, 2(2), 23–35. https://doi.org/10.56406/jsm.v2i02.325

Randi, N. S. P. O. (2022). Probelamatika kepala sekolah dalam supervisi konseling. Alacrity: Journal of Education, 61–70. https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i1.70

Randi, P. O. (2024). Analisis fungsi kepala sekolah dalam supervisi konseling. Invention: Journal Research and Education Studies, 38–48. https://doi.org/10.51178/invention.v5i1.1772

Rokimin, R., & Pangestu, E. Z. (2023). Strategi kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi guru bimbingan dan konseling: Studi kasus di MTs. Nurul Huda Pondok Betung Tangerang Selatan Banten. Edumanajerial, 1(1), 32–41. https://doi.org/10.15408/em.v1i1.32277

Sari, P. A. K. (2021). Pelayanan profesional guru bimbingan konseling dalam meminimalisir kesalahpahaman tentang bimbingan konseling di sekolah. Journal of Education and Teaching Learning (JETL), 3(1), 36–49. https://doi.org/10.51178/jetl.v3i1.117

Siregar, S. K., Lubis, S. A., & Syukri, M. (2023). Evaluasi program bimbingan konseling di SMK Penerbangan PBD Medan. Research and Development Journal of Education, 9(2), 977. https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19515

Wibowo, M. E. (2017). Profesi konselor dalam Kurikulum 2013 dan permasalahannya. Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 1(2). https://doi.org/10.30598/jbkt.v1i2.143

Yondris, Y., Ardimen, A., & Dasril, D. (2022). Konsep dan aplikasi layanan dukungan sistem sebagai komponen program konseling komprehensif: A literature review. Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan, 5(2). https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v5i2.10928